



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
Website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR **SK. 261 / BPSDMP - 2020**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) wajib disusun setiap Pimpinan Unit Kerja;
  - b. bahwa dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta adanya restrukturisasi program pada Kementerian Perhubungan, perlu untuk ditinjau kembali Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor SK 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 2020-2024.
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan acuan yang digunakan dalam menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran;
  - c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.
- KETIGA : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Satgas COVID-19 BPSDMP harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 8 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 DESEMBER 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



SUGIHARDJO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Unit Kerja Eselon II dan UPT di lingkungan BPSDMP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR: SK.261 / BPSDMP- 2020

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

## INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

### I. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

- 1 Nama Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
  - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
- 4 Indikator Kinerja :

PERSPEKTIF	TUJUAN	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT Indeks
Customer Perspective	T1. Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah	SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
			IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
			IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
				Orang
				%
				%
			SP.DL.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi IKK 2. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi IKK 3. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Internal bussiness process	T2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Indeks
		SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
		SK.WA.03.04.Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur	IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks
		SK.DL.01.02.Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	IKK 10.Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
		SK.DL.01.03. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
			IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
			IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
			IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
			IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
			IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
			IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
Learn & Growth	T3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi	SK .WA.03.02. Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP IKK 21. Kualitas Kebijakan BPSDMP	Nilai Nilai Indeks %
		SK.WA.01.01 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
		SK.DL.01.01. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Nilai Indeks
		SK.WA.03.03. Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDMP Perhubungan	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
		SK.WA.03.04 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.WA.03.</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
<b>IKP 1</b>	Indeks RB Kementerian Perhubungan	78	79	79.5	80	80.5
<b>DEFINISI</b>						
Nilai yang dapat diukur dalam Reformasi Birokrasi dilingkungan Kementerian Perhubungan						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan oleh Kementerian PAN-RB						
<b>SATUAN</b>						
Indeks						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
BIRO UMUM						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.WA.03.</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
<b>IKP 2</b>	Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	100	100	100	100	100
<b>DEFINISI</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.</li> <li>2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Biro Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Sekretariat Jenderal merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada <i>stakeholders</i> (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Biro Umum.</li> <li>4. Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum, lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).</li> </ol>						
<b>SUMBER DATA</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.</li> <li>2. Hasil kuesioner <i>assessment</i> (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Biro Umum sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan Biro Umum.</li> </ol>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lingkungan BPSDM Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi BPSMDP sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%).</li> <li>2. Dimensi yang diukur meliputi unsur K3.</li> </ol>						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
BIRO UMUM						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKP 3</b>	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	85	85	85	85	85
<b>DEFINISI</b>						
Pemenuhan Sumber daya manusia dalam bidang Transportasi yang berkompeten						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
<p>Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dan Berkeselamatan:  <math>(Cvokasi \times Wvokasi) + (Ckompetensi \times Wkompetensi)</math></p> <p>Dimana:</p> <p>Wvokasi =Bobot Persentasi penyerapan lulusan diklat pembentukan 60%</p> <p>Wkompetensi =Bobot persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi 40%</p> <p>Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (Cvokasi)</p> <p>Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi (Ckompetensi)</p>						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PUSBANG DAN UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 1</b>	Jumlah Peserta Diklat Transportasi	366.061	375.253	386.748	389.488	398.738
<b>DEFINISI</b>						
Jumlah Peserta Diklat Transportasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun (n)						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Jumlah Realisasi Peserta Diklat Transportasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun (n) Satuan : Orang n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Orang						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT, LAUT, DAN UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Peserta Diklat Pembentukan</li> <li>b. Jumlah Peserta Diklat Teknis (Penjurusan, revalidasi, kerjasama dll)</li> <li>c. Jumlah Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>d. Jumlah Peserta diklat daerah afirmasi (sesuai dengan PP No.78 Tahun 2014)</li> <li>e. Jumlah Peserta diklat daerah rawan bencana</li> <li>f. Jumlah Peserta beasiswa</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 2</b>	Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	85	85	85	85	85
<b>DEFINISI</b>						
Prosentase jumlah lulusan Diklat Transportasi yang telah lulus dibandingkan dengan peserta pada satu angkatan yang sama						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Transportasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target lulusan Diklat Transportasi pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
Satuan : % n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Persentase (%)						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta Indikator:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus dalam uji kompetensi</li> <li>b. IPK &gt; 3 (untuk diklat pembentukan)</li> <li>c. Lulus tanpa terlibat tindak kekerasan / catatan kriminal</li> <li>d. Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan</li> <li>e. Jumlah Lulusan Diklat Pelatihan</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 3</b>	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	85	85	85	85	85
<b>DEFINISI</b>						
Prosentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun (n-1) yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada tahun (n-1).						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } (n - 1) \text{ yang telah mendapat pekerjaan pada tahun } (n) \leq 1 \text{ tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } (n - 1)} \right) \times 100 \%$						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT/LAUT/UDARA SELAIN BALAI						
<b>Catatan</b>						
Meta Indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama tidak lebih dari 1(satu) tahun</li> <li>- Mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi (linier dengan jurusan yang diambil)</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 4</b>	Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	85	85	85	85	85
<b>DEFINISI</b>						
Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir ;						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Kapasitas Sarpras yang digunakan pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Keseluruhan Kapasitas Sarpras pada tahun } (n)} \right) \times 100 \%$						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sarana layak guna yang berteknologi tinggi/mutakhir</li> <li>• Jumlah prasarana yang layak guna</li> <li>• Prasarana yang dibangun sesuai dengan masterplan</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 5</b>	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	844	844	844	844	844
<b>DEFINISI</b>						
jumlah kegiatan pengabdian masyarakat pada lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang dilaksanakan di bawah naungan BPSDM Perhubungan.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan pada tahun (n)						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Kegiatan						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator : Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 6</b>	Persentase Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	328	351	361	374	389
<b>DEFINISI</b>						
Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional pada lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian di bawah naungan BPSDM Perhubungan.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional pada tahun (n)						
n : Tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
dokumen						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator : - Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.DL.01.</b>	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten					
<b>IKK 7</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3	3	3	3
<b>DEFINISI</b>						
Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan BPSDMP perhubungan yang merupakan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.						
<b>SUMBER DATA</b>						
Hasil survei terhadap stakeholder atau pengguna jasa layanan.						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
<p>a. Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi <i>peak season</i> tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari <b>Morgan and Krejcie</b> atau dengan perhitungan sebagai berikut:</p> $S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$ <p>Dimana:</p> <p>S = jumlah sampel</p> <p><math>\lambda^2</math> = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%</p> <p>N = populasi</p> <p>P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5</p> <p>d = 0,0</p> <p>b. Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui e-survey bisa dilakukan melalui layar monitor yang telah disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik atau melalui petugas dengan menggunakan gawai (alat komunikasi).</p> <p>c. Apabila terdapat keterbatasan sarana dan prasarana (jaringan internet), maka survei dapat dilakukan secara manual dengan menyebarkan formulir survei kepada responden.</p> <p>d. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat sembilan unsur SKM yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (contoh formulir survei pada lampiran 3).</p> <p>e. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;</li> <li>2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;</li> <li>3) Baik, diberi nilai persepsi 3;</li> <li>4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.</li> </ol> <p>f. Layanan yang disurvei adalah perjenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan.</p> <p>g. Melakukan tabulasi data secara berurutan untuk setiap unsur. Skala likert untuk masing-masing pertanyaan (unsur) terdiri dari buruk (nilai 1), kurang baik (nilai 2), baik (nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). Masing-masing jumlah responden yang memilih skala likert tersebut disalin kedalam tabel kemudian dikalikan nilai masing-masing dan dirata-ratakan.</p> <p>h. Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada sembilan unsur maka = <math>1/9 = 0,11</math>.</p> <p>i. Melakukan perhitungan Nilai Rata – Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan.</p> <p>j. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan.</p> <p>k. Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka</p>						

diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.

- i. Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu Layanan

No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

- m. Agregasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Agregasi perhitungan survei kepuasan masyarakat adalah proses pengumpulan hasil SKM pada masing-masing subsektor untuk dilakukan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Agregasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Agregasi Indeks Layanan Publik dan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat. Agregasi Indeks Layanan Publik digunakan untuk menghitung indeks keseluruhan dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sedangkan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk menghitung indeks dalam satu Unit Kerja Eselon 1.
- 3) Agregasi Indeks Layanan Publik dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Agregasi Indeks Layanan Publik} = \frac{\sum \text{agregasi IKM seluruh subsektor}}{\sum \text{Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan SKM}}$$

- 4) Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing subsektor dilakukan dengan metode pendekatan:

$$\text{Agregasi IKM} = \sum (IKM_a \times f_a) + (IKM_b \times f_b) + (IKM_c \times f_c) + (IKM_d \times f_d)$$

Keterangan:

$IKM_{a,b,c,d}$  = Nilai rata-rata IKM pada Unit Pelayanan Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah

$f_{a,b,c,d}$  = Faktor koefisien pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah. Faktor koefisien diperoleh dengan membagi populasi pada unit pelayanan publik tipe tertentu dengan jumlah total populasi pada semua tipe unit pelayanan publik. Populasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. untuk Unit Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan populasi yang digunakan adalah jumlah Peserta Diklat pertahun.

**SATUAN**

Indeks

**PENANGGUNG JAWAB DATA**

UPT DARAT/LAUT/UDARA

**Catatan**

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T2</b>	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
<b>SK.WA.03.01</b>	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan					
<b>IKK 8</b>	Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	80	82	85	86	87
<b>DEFINISI</b>						
Prosentase jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) dilingkup Sekretariat BPSDMP, Pusbang Aparatur dan BP3KSDMT						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
Satuan : %						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SETDAN, PPSDMAP , BP3KSMP						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kerjasama Dalam Negeri</li> <li>- Jumlah Kerjasama Luar Negeri</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T2</b>	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
<b>SK.WA.03.04</b>	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur					
<b>IKK 9.1</b>	Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	71	72	74	74	75
<b>DEFINISI</b>						
Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN Kementerian Perhubungan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.						
<b>SUMBER DATA</b>						
1. Biro Kepegawaian dan Organisasi 2. Unit Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.						
NO	Dimensi	Bobot				
<b>A</b>	<b>Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)</b>					
1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).	25				
2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).	20				
3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).	15				
4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).	10				
5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.	5				
6	Di bawah SLTA.	1				
<b>Total Kualifikasi</b>		<b>25%</b>				
<b>B</b>	<b>Kompetensi</b>					
1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).	15				
2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).	15				
3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Bobot	15 / 22,5				

	mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	
4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.	10 / 17,5
<b>Total Kompetensi</b>		<b>40%</b>
<b>C</b>	<b>Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP))</b>	
1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	30
2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	25
3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15
4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	5
5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	1
<b>Total Kinerja</b>		<b>30%</b>
<b>D</b>	<b>Disiplin</b>	
1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.	5
2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.	3
3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.	2
4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1
<b>Total Disiplin</b>		<b>5%</b>
<b>Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (A+B+C+D)</b>		<b>100%</b>
<b>SATUAN</b>		
Nilai		
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>		
BIRO KEPEGAWAIAN, PPSDMAP DAN BP3KSMPT		
<b>Catatan</b>		

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
T2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
SK.WA.03.04	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur					
IKK 9.2	Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	71	72	74	74	75
<b>DEFINISI</b>						
Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN dilingkungan BPSDM Perhubungan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.						
<b>SUMBER DATA</b>						
1. Unit Pengelola Kepegawaian di Lingkungan BPSDM Perhubungan						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.						
NO	Dimensi	Bobot				
<b>A</b>	<b>Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)</b>					
1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).	25				
2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).	20				
3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).	15				
4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).	10				
5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.	5				
6	Di bawah SLTA.	1				
<b>Total Kualifikasi</b>		<b>25%</b>				
<b>B</b>	<b>Kompetensi</b>					
1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).	15				
2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).	15				
3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir dan Bobot	15 / 22,5				

	nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	
4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.	10 / 17,5
<b>Total Kompetensi</b>		<b>40%</b>
<b>C</b>	<b>Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)</b>	
1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	30
2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	25
3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15
4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	5
5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	1
<b>Total Kinerja</b>		<b>30%</b>
<b>D</b>	<b>Disiplin</b>	
1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.	5
2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.	3
3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.	2
4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1
<b>Total Disiplin</b>		<b>5%</b>
<b>Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (A+B+C+D)</b>		<b>100%</b>
<b>SATUAN</b>		
Nilai		
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>		
SELURUH UPT BPSDMP		
<b>Catatan</b>		

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T2</b>	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
<b>SK.DL.01.02</b>	Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar					
<b>IKK 10</b>	Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	100	100	100	100	100
<b>DEFINISI</b>						
Persentase Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jenis pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan pada tahun (n)						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan jumlah jenis diklat yang ditargetkan pada dokumen perencanaan untuk tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
Satuan : %						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
%						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PUSBANG DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta Indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Jenis Diklat Pembentukan</li> <li>• Jumlah Jenis Diklat Teknis (Penjenjangan, revalidasi, kerjasama dll)</li> <li>• Jumlah Jenis Diklat Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>• Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang terselenggara sesuai dengan perencanaan awal berdasarkan kebutuhan pasar/industri transportasi, SKKNI, atau TNA.</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T2</b>	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
<b>SK.DL.01.03</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.					
<b>IKK 11</b>	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	85	86	87	88	89
<b>DEFINISI</b>						
Presentase jumlah Program Studi yang terakreditasi (minimal "B") atau sesuai standar dibandingkan dengan total keseluruhan Program Studi pada lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Program Studi yang terakreditasi pada Lembaga pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Total Program Studi pada Lembaga pendidikan dan pelatihan}} \right) \times 100 \%$						
Satuan : %						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
%						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PUSBANG DAN UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
<b>Meta indikator :</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program Studi yang dimiliki</li> <li>- Jumlah prodi yang terakreditasi minimal "B" oleh BAN-PT</li> <li>- Penilaian Program Studi baru H+3 ; H:tahun prodi baru ditetapkan/disahkan</li> <li>- Jumlah Jenis Diklat yang dimiliki (untuk Balai)</li> <li>- Jumlah Jenis Diklat yang memiliki approval oleh instansi berwenang</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T2</b>	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi					
<b>SK.DL.01.03</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.					
<b>IKK 12</b>	Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	85	86	87	88	89
<b>DEFINISI</b>						
Prosentase jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n) di lingkup Satker/UPT matra darat, laut dan Udara						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n)}}{\text{jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
Satuan : % n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
%						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PUSBANG DAN UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kerjasama Dalam Negeri</li> <li>- Jumlah Kerjasama Luar Negeri</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
T3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
SK.WA.03.02	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 13	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
<b>DEFINISI</b>						
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
<b>SUMBER DATA</b>						
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian <i>Maturity Level</i> SPIP difokuskan pada 25 sub Unsur SPIP. Masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter <i>Maturity Level</i> SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP.						
	<b>NO</b>	<b>TINGKAT MATURITAS</b>	<b>INTERVAL SKOR</b>			
	0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ( $0 < \text{skor} < 1,0$ )			
	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )			
	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )			
	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )			
	4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )			
	5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )			
<b>Tingkat</b>	<b>Karakteristik SPIP</b>					
<b>Belum Ada</b>	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanaka praktik-pengendalian intern.					
<b>Rintisan</b>	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.					
<b>Berkembang</b>	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.					
<b>Terdefinisi</b>	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.					
<b>Terkelola dan Terukur</b>	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.					
<b>Optimum</b>	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.					
<b>SATUAN</b>						
Level						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.02</b>	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
<b>IKK 14</b>	Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	91	91.5	91.7	91.9	92
<b>DEFINISI</b>						
<p>1. Arsip sangat penting bagi organisasi karena arsip bukan hanya sebagai catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan suatu organisasi pemerintahan saja. Arsip merupakan bukti otentik yang sangat penting, keberadaannya sangat diperlukan pimpinan dalam mengambil keputusan. Pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan <i>e-goverment</i> merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern.</p> <p>2. Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan reformasi birokrasi. Pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi yang lebih lancar, termasuk pendataan. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik.</p> <p>Untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.</p> <p>3. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan dengan objek pengawasan terdiri dari kementerian, lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD/BUMDes yang mengikuti Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan akan menghasilkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan (LHM), yaitu laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan).</p> <p>4. Ruang lingkup pengawasan kearsipan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan;</li> <li>- pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;</li> <li>- pembentukan tim pengawas kearsipan; dan</li> <li>- prosedur pengawasan kearsipan.</li> </ul> <p>5. Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:</p> <p>a. Pengawasan Kearsipan eksternal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Sistem Kearsipan eksternal; dan</li> <li>2) Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal.</li> </ol> <p>b. Pengawasan Kearsipan Internal; dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I (Biro Umum, Sekretariat Jenderal) terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) seluruh Unit Pengolah setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>2) Unit Kearsipan II (Setitjen, Setditjen dan Setbadan) dan Unit Kearsipan III (UPT).</li> </ol> <p>6. Pengawasan kearsipan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengawasan Sistem Kearsipan Internal meliputi pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan) dan sumber daya kearsipan (sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana);</li> <li>2) Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif.</li> </ol>						
<b>SUMBER DATA</b>						
Surat hasil pengawasan eksternal dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).						

**CARA MENGHITUNG**

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- f. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori **AA (sangat memuaskan)**;
- g. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori **A (memuaskan)**;
- h. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori **BB (sangat baik)**;
- i. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori **B (baik)**;
- j. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori **CC (cukup)**; dan
- k. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori **C (kurang)**; dan
- l. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori **D (sangat kurang)**.

**SATUAN**

Nilai

**PENANGGUNG JAWAB DATA**

SELURUH UPTBPSDMP

**Catatan**

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
T3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
SK.WA.03.02	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 15	Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	75	76	77	78	80
<b>DEFINISI</b>						
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik. Indeks Pengelolaan Aset Kemenhub dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan (PSP) BMN dan Tingkat kepatuhan pelaporan BMN (Laporan BMN Semester 1, Semester 2/Tahunan, dan Laporan Wasdal).						
<b>SUMBER DATA</b>						
Biro Layanan dan Pengelolaan BMN, Aplikasi terkait SIMAK BMN						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan ada terdiri dari 2 Indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%)						
<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>NILAI</b>		<b>BOBOT</b>		
<b>1</b>	<b>Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya</b>					
a	Lebih dari sama dengan 80%	1		50%		
b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80				
c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60				
d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40				
e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20				
f	0% s.d. kurang dari 1%	0				
<b>Total Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = nilai (1) x bobot</b>				<b>50</b>		
<b>2</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN</b>					
a	Laporan BMN Semester 1	1		50%		
b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	1				
c	Laporan Wasdal BMN	1				
<b>Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = nilai (2) rata2 x bobot</b>				<b>50</b>		
<b>Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan</b>				<b>Maksimal nilai =100</b>		
<b>SATUAN</b>						
Nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.02</b>	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
<b>IKK 16</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	80.2	84.2	86.2	88.2	90.2
<b>DEFINISI</b>						
Peraturan Menteri Keuangan Nomor.47/pmk.02/2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018.						
<b>SUMBER DATA</b>						
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (Nilai SMART) Nilai IKPA						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$(60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA})$  EKA : Nilai Evaluasi Anggaran IKPA : Nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran						
<b>SATUAN</b>						
Nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						
Nilai EKA dan Nilai IKPA dapat menggunakan nilai yang terdapat pada aplikasi SMART						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.02</b>	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
<b>IKK 17</b>	Indeks Perencanaan BPSDMP	78	80	82	84	85
<b>DEFINISI</b>						
Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran						
<b>SUMBER DATA</b>						
Biro Perencanaan						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan.						
<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>Bobot</b>				
<b>A</b>	<b>Integrasi Perencanaan</b>					
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra K/L dengan sasaran RPJMN *)	20%				
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	20%				
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	30%				
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)	30%				
<b>Total Integrasi Perencanaan</b>		<b>100%</b>				
<b>SATUAN</b>						
Nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						
1. *) diukur 1 kali dalam 5 tahun						
2. **) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.02</b>	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
<b>IKK 18</b>	Nilai SAKIP BPSDMP	85	85	90	90	90
<b>DEFINISI</b>						
Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( <i>outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil ( <i>result oriented government</i> )						
<b>SUMBER DATA</b>						
Kementerian PANRB						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%</li> <li>2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 25%</li> <li>3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%</li> <li>4. Evaluasi Kinerja, dengan bobot 10%</li> <li>5. Capaian Kinerja, dengan bobot 20%</li> </ol>						
No	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi			
1.	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>			
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel			
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal			
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan			
4.	CC	>50 – 60	<b>Cukup (memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar			
5.	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar			
6.	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.			
<b>SATUAN</b>						
Nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>	Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah					
<b>SP.WA.03.</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
<b>IKK 19</b>	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	70	71	72	73	74
<b>DEFINISI</b>						
<p>1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokol, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.</p> <p>2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan instansi di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di kantor sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan BPSDM Perhubungan. lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).</p>						
<b>SUMBER DATA</b>						
<p>1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor BPSDM Perhubungan Terhadap Kinerja Layanan yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor BPSDM Perhubungan.</p> <p>2. Hasil kuesioner <i>assessment</i> (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal BPSDM Perhubungan sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor BPSDM Perhubungan Terhadap Kinerja Layanannya.</p>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
No	Uraian	Nilai	Keterangan			
1	Tingkat Layanan Rumah Tangga :	20	(RKA Tepat Waktu; LKIP Tepat Waktu; Kinerja Anggaran ; % Pemenuhan Dokumen RENSTRA; %Pencapaian Indeks Maturitas SPIP >3 ) PMK 214/PMK.02/2017			
2	% Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>•(%) Jumlah asset yang dicatat pada tahun (n) dibandingkan dengan Jumlah asset yang sudah terealisasi pada tahun (n) x total nilai</li> <li>•Pencatatan asset BMN di tahun (n) pada aplikasi SIMAK BMN tahun (n)</li> <li>•Apabila tidak terdapat realisasi aset ditahun (n) maka nilai 5</li> </ul>			
3	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkantoran	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>•(%) Jumlah Sarana perkantoran yang terealisasi pada tahun (n) dibandingkn Jumlah sarana perkantoran dengan target sesuai kebutuhan pada tahun (n) x total nilai</li> <li>•Apabila tidak terdapat target/usulan ditahun (n) maka nilai 5</li> </ul>			
4	Tingkat Keandalan Sarana Perkantoran	10	(%) Jumlah sarana perkantoran yang dapat digunakan secara optimal dibandingkan jumlah sarana yang tercatat di BMN x total nilai			
5	Tingkat Layanan	60	Kuesioner indeks pelayanan			
<b>SATUAN</b>						
nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPT BPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
T3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
SK.WA.01.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP					
IKK 20	Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	72	73	74	75	76
<b>DEFINISI</b>						
Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan merupakan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelerasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
NO	Uraian Penilaian	Bobot Penilaian	Keterangan			
1	Agenda Setting	24	n-1 s.d n			
2	Formulasi Peraturan	36	n-1 s.d n			
3	Implementasi Peraturan	24	n-2 s.d n			
4	Evaluasi Peraturan	16	n-2 s.d n-1			
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SEKRETARIAT BPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
T3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
SK.WA.01.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP					
IKK 21	Kualitas Kebijakan BPSDMP	75	76	77	78	79
<b>DEFINISI</b>						
Presentase Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur dibandingkan dengan total target keseluruhan target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang Aparatur.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n)}}{\text{Jumlah Target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
%						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PPSDMAP						
<b>Catatan</b>						
<b>Meta indikator :</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan Kebijakan Teknis Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan</li> <li>- Analisa Kebutuhan Diklat</li> <li>- Man Power Planning (MPP)</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SP.DL.2</b>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi					
<b>IKK 22</b>	Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	100	100	100	100	100
<b>DEFINISI</b>						
Presentase jumlah lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menghasilkan NSPK dibandingkan dengan total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah NSPK yang dihasilkan tahun (n)}}{\text{Jumlah Target NSPK yang dihasilkan tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
Persentase						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
PUSBANG DAN UPT DARAT/LAUT/UDARA						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Norma, standar, prosedur dan kriteria yang tersusun</li> <li>• Kurikulum</li> <li>• Modul dan bahan ajar</li> <li>• SKKNI</li> <li>• Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan</li> <li>• Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi</li> </ul>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.03</b>	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan					
<b>IKK 23</b>	Indeks Kelembagaan BPSDMP	78	78.5	79	79.5	80
<b>DEFINISI</b>						
<p>evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kompleksitas;</li> <li>2. formalisasi; dan</li> <li>3. sentralisasi.</li> </ol> <p>Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keselarasan (<i>alignment</i>);</li> <li>2. tata kelola (<i>governance</i>) dan kepatuhan (<i>compliance</i>);</li> <li>3. perbaikan dan peningkatan proses;</li> <li>4. manajemen risiko; dan</li> <li>5. teknologi informasi.</li> </ol> <p>Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi dimaksud merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.</p>						
<b>SUMBER DATA</b>						
Permenpan RB No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi. Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner yang tercantum di dalam Permenpan RB No.20 Tahun 2018.						
<b>PERINGKAT</b>		<b>KETERANGAN</b>				
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100		Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.				
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80		Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.				
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60		Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.				
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40		Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan				

	berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi
<b>SATUAN</b>	
Nilai	
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>	
SELURUH UPTBPSDMP	
<b>Catatan</b>	

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>T3</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<b>SK.WA.03.03</b>	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan					
<b>IKK 24</b>	Indeks Tata Kelola manajemen ASN BPSDMP	0.8	0.9	0.92	0.96	1
<b>DEFINISI</b>						
Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Dokumen HCDP (human capital development plan) Merupakan dokumen perencanaan pengembangan pegawai. Setiap individu pegawai pengembangan kompetensinya sudah direncanakan, jangka pendek dan jangka menengahnya), dari pengembangan kompetensi berdasarkan pendidikan formal maupun non formal (kompetensi teknis/manajerial)						
<b>SUMBER DATA</b>						
Biro Perencanaan						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
No	Uraian Penilaian	bobot	Keterangan			
1	Tersusunnya dokumen HCDP	30	Konsep : 10 ; Dokumen Sah : 30			
2	% Kesesuaian Formasi ASN dengan HCDP	25	Thdp Konsep : 10 ; Thdp HCDP :25			
3	%Ketepatan waktu kenaikan Pangkat/jabatan ASN	15				
4	% Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	15				
5	% Ketepatan Waktu Perolehan SK Pensiun	15	Jika tahun berjalan tidak ada ASN pensiun nilai 15			
HCDP : Human Capital Development Plan						
<b>SATUAN</b>						
Nilai						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>T3</i>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi					
<i>SK.WA.03.05</i>	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP					
<i>IKK 25</i>	Indeks SPBE BPSDMP	90	90	90	90	90
<b>DEFINISI</b>						
Persentase Keandalan Sistem Informasi BPSDMP Perhubungan (web, aplikasi berbasis e, dsb), termasuk aplikasi untuk pemantauan dan monitoring sistem informasi pendidikan dan pelatihan satuan kerja/UPT.						
<b>SUMBER DATA</b>						
<b>CARA MENGHITUNG</b>						
$\left( \frac{\text{Jumlah Sistem informasi yang di update/dapat diakses tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan Sistem informasi pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$						
n : tahun berjalan						
<b>SATUAN</b>						
%						
<b>PENANGGUNG JAWAB DATA</b>						
SELURUH UPTBPSDMP						
<b>Catatan</b>						
Meta indikator :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah informasi yang menjangkau sasaran penerima informasi</li> <li>- Jumlah kritik dan saran yang masuk pada helpdesk/PPID</li> </ul>						

## II. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

### PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan perkeretaapian
- 3 Fungsi :
  - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, rencana pengembangan sumber daya manusia, penetapan dan perumusan kinerja, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan data, laporan evaluasi kegiatan, teknologi informasi dan komunikasi, penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen kepegawaian, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan perpustakaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta koordinasi tata kelola dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. penyiapan koordinasi program dan anggaran pendidikan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan, program pembinaan lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi, standardisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pendidikan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. penyiapan koordinasi program dan anggaran pelatihan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelatihan, pelaksanaan sertifikasi, standardisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pelatihan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.

#### 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
c	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	4	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
d	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	5	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		6	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
e	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	7	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		8	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		10	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		11	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		12	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
f	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	13	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		14	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
g	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	15	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		17	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
h	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	18	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

### III. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

#### PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan Laut
- 3 Fungsi :
  - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, rencana pengembangan sumber daya manusia, penetapan dan perumusan kinerja, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan data, laporan evaluasi kegiatan, teknologi informasi dan komunikasi, penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen kepegawaian, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan perpustakaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta koordinasi tata kelola dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. penyiapan koordinasi program dan anggaran pendidikan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan, program pembinaan lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pendidikan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. penyiapan koordinasi program dan anggaran pelatihan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelatihan, pelaksanaan sertifikasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pelatihan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
c	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	4	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
		5	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
d	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	6	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
		7	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
e	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	8	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		10	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		11	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		12	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		13	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
f	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	14	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
g	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	15	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		17	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
h	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	18	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**IV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA**

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
- 2 Tugas : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan Udara
- 3 Fungsi :
  - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, rencana pengembangan sumber daya manusia, penetapan dan perumusan kinerja, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan data, laporan evaluasi kegiatan, teknologi informasi dan komunikasi, penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen kepegawaian, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan perpustakaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta koordinasi tata kelola dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. penyiapan koordinasi program dan anggaran pendidikan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan, program pembinaan lembaga pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi, standardisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pendidikan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
  - c. penyiapan koordinasi program dan anggaran pelatihan, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelatihan, pelaksanaan sertifikasi, standardisasi, akreditasi, serta rekomendasi pendirian Lembaga Pelatihan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
c	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	4	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
		d	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	5
6	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi			%
e	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	7	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		8	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		10	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		11	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		12	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
f	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	13	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		14	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
g	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	15	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		17	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
h	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	18	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan
- 3 Fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, usulan revisi anggaran, pengumpulan data dukung dan evaluasi terkait dengan laporan hasil audit, pemeriksaan dan/atau pengawasan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyusunan pemantauan anggaran dan realisasi daya serap, usulan pengelola anggaran, pengelolaan dan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara, pengelolaan kerumahtanggaan, sarana prasarana pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, layanan kesehatan, serta koordinasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan bahan manajemen kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, urusan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keterbukaan informasi publik, serta koordinasi tata kelola Badan Layanan Umum.
  - b. penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan, rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, rencana, program kerja dan anggaran, perumusan kinerja, monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural dan fungsional aparatur perhubungan; dan
  - d. penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	3	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
	SK.WA.03.04. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur	4	IKK 9. 1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks
c	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		6	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		7	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		8	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		10	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
d	SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	11	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		12	IKK 21. Kualitas Kebijakan BPSDMP	%
e	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	13	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		15	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
f	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	16	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**VI. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, serta pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 3 Fungsi :
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, perumusan kinerja, pengolahan dan pengelolaan data, pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- penyiapan manajemen kepegawaian, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum;
- b. Umum, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi;
- penyiapan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi keuangan, Barang Milik Negara, dan tindak lanjut hasil audit, pemeriksaan dan/atau pengawasan; dan
- penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolanan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, pelaksanaan advokasi, penyusunan dokumen kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi, hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, promosi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- d. transportasi, pelaksanaan advokasi, penyusunan dokumen kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi, hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, promosi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	3	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
		4	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
c	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		6	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		7	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		8	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		10	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
d	SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	11	IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	Indeks
e	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		13	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		14	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
f	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	15	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

## VII.

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**  
**SEKOLAH TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Sekolah Tinggi di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi Darat, Laut dan Udara
- 3 Fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan akademik di bidang transportasi Darat, Laut dan Udara;
  - b. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi di bidang transportasi Darat, Laut dan Udara;
  - c. Pelaksanaan penelitian di bidang transportasi Darat, Laut dan Udara;
  - d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya
  - f. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
  - g. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta akademik;
  - h. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
		3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
		8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**VIII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)
- 2 Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan semua jenjang dan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional melalui program pendidikan dan pelatihan penyegaran dan peningkatan ilmu pelayaran untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana strategis bisnis BP3IP;
  - b. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
  - c. Pengusulan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis;
  - d. Penyampaian pertanggungjawaban kinerja pelayanan dan keuangan;
  - e. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program serta kerjasama diklat;
  - f. Pengembangan kurikulum dan silabus, sistem dan metode pengajaran;
  - g. Pelaksanaan pembelajaran dan administrasi pengajaran;
  - h. Pelaksanaan pengelolaan dan perawatan serta administrasi sarana dan prasarana diklat;
  - i. Pengembangan dan pengadaan tenaga administrasi, tenaga teknis dan tenaga pengajar;
  - j. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan mental, moral dan disiplin peserta diklat;
  - k. Pelaksanaan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta pengabdian masyarakat;
  - l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum serta hubungan masyarakat;
  - m. Pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
  - n. Pengelolaan unit penunjang;
  - o. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - p. Pengembangan sistem manajemen mutu.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
		7	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		8	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		9	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	10	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		11	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	12	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		13	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		15	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		18	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	19	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	20	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		21	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		22	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	23	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**IX. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran
- 3 Fungsi :

  - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vakasi di bidang pelayaran;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya
  - d. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta akademik ketarunaan;
  - e. Pengembangan sistem manajemen mutu;
  - f. Pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan.
  - g. Pelaksanaan pengembangan usaha dan kerjasama;
  - h. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - i. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;

- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
		3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi /Mutakhir	%
		8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**X. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)  
POLITEKNIK PELAYARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Pelayaran (PP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran
- 3 Fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang pelayaran;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana lainnya
  - d. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
  - e. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum, serta akademik dan ketarunaan;
  - f. Pengembangan sistem manajemen mutu;
  - g. Pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan taruna;
  - h. Pelaksanaan kerja sama pendidikan vokasi;
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%		
		8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan		
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen		
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		
		c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
				12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XI. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (PKTJ) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Keselamatan Transportasi jalan
- 3 Fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang Keselamatan Transportasi jalan;
  - b. Pelaksanaan penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan
  - c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang keselamatan transportasi jalan;
  - d. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya;
  - e. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum serta administrasi akademik ketarunaan;
  - f. Pelaksanaan program pengembangan usaha, pemasaran, kerjasama pendidikan dan pelatihan;
  - g. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
  - h. Pelaksanaan pemeriksaan Intern
  - i. Pelaksanaan program pembangunan karakter;
  - j. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya; dan
  - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
		3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		b	SP.DL.01. Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
				8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
				9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
				10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%		
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%		
d	SK .WA.03.02. Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XII INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN (PKTJ) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Transportasi Darat
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi , penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi Darat
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bodang transportasi darat
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan intern
  - e. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
  - f. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan
  - g. Pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama
  - h. Pengembangan program, data dan evaluasi
  - i. Pelaksanaan pembangunan karakter
  - j. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha
  - k. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%		
		8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan		
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen		
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		
		c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
				12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

### XIII INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

#### POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA (PPI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI)
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perkeretaapian
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program pendidikan
  - b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang perkeretaapian
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan intern
  - e. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu
  - f. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan
  - g. Pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama
  - h. Pengelolaan fasilitas pendidikan
  - i. Pengembangan program, data dan evaluasi
  - j. Pelaksanaan pembangunan karakter
  - k. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha
  - l. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

#### 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
		3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
				8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
				9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
				10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%		
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%		
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XIV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**AKADEMI PENERBANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Akademi Penerbang Indonesia (API) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program pendidikan
  - b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan intern
  - e. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu
  - f. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan
  - g. Pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama
  - h. Pengelolaan fasilitas pendidikan
  - i. Pengembangan program, data dan evaluasi
  - j. Pelaksanaan pembangunan karakter
  - k. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha
  - l. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%		
		8	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan		
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen		
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		
		c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
				12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
		20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (Mempawah)
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, dan perkeretaapian
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat dan hukum;
  - c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, serta perkeretaapian;
  - d. Pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
  - e. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
  - f. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
		7	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		8	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		9	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	10	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		11	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	12	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		13	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		15	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		18	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	19	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	20	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		21	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		22	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	23	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**XVI. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BP2TL) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL)
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang transportasi laut.
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan transportasi laut;
  - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi laut;
  - c. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. Pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
  - e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
		7	IKK 5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		8	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		9	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	10	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		11	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	12	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		13	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		15	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	18	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		19	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	20	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		21	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	22	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
		23	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**XVII. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi di bidang
- 3 Fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbangan;
  - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penerbangan
  - c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peserta pendidikan dan pelatihan serta praktek kerja lapangan;
  - d. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbangan;
  - e. pengelolaan fasilitas dan pelatihan penerbangan
  - f. pelaksanaan pengembangan Sistem Manajemen Mutu;
  - g. Pengelolaan unit penunjang;
  - h. Pelaksanaan data dan informasi serta penyusunan laporan;
  - i. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggan.

4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%
		6	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
		7	IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
		8	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
		9	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	10	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
		11	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	12	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		13	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		15	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		16	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		17	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	18	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		19	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	20	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		21	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		22	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	23	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

**XVIII INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)**

**POLITEKNIK PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Penerbangan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang penerbangan
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
  - b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - e. Pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang penerbangan;
  - f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
  - g. pengelolaan keuangan dan administrasi umum;
  - h. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
  - i. pengembangan program, data dan evaluasi
  - j. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana;
  - k. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerjasama;
  - l. pelaksanaan pembangunan karakter;
  - m. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%		
		8	IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan		
		9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen		
		10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		
		c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
				12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
		24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XIX. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)****POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN**

- 1 Nama Organisasi : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan
- 2 Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- 3 Fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - d. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
  - e. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
  - f. Pengelolaan keuangan dan administrasi umum;
  - g. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
  - h. Pengembangan program, data, dan evaluasi;
  - i. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, sarana, dan prasarana;
  - j. Pelaksanaan pengembangan usaha dan kerjasama;
  - k. Pelaksanaan pembangunan karakter;
  - l. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan		
a	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks		
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%		
		3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%		
		4	IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang		
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi	%		
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%		
		b	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	7	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
				8	IKK 5 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
				9	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
				10	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
c	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%		
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%		
d	SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level		
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai		
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai		
		16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai		
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai		
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai		
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai		
e	SK.DL.01 .04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%		
f	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai		
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks		
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai		
g	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%		

**XX. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)****BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI**

- 1 Nama Organisasi : Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi
- 2 Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM transportasi
- 3 Fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen diri, manajemen hubungan antar personal, manajemen organisasi kerja dan manajemen spiritual;
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan
- e. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat dan kerumahtanggaan.
- 4 Indikator Kinerja Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS (SS)		URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		Satuan
a	SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKK 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
		2	IKK 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
b	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	3	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
		4	IKK 9. 1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks
c	SK.WA.03.04. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur	5	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
		6	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
		7	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
		8	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
		9	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
		10	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
		11	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
d	SK.WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
		14	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		15	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
e	SK.WA.03.03. Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	16	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%
	SK.WA.03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP			

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



SUGIHARDJO